

## ANALISIS KONFLIK DI ASIA TENGGARA

Siti Hartina Mbele

Program Studi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada

*E-mail:* [hartinambele4@gmail.com](mailto:hartinambele4@gmail.com)

### ABSTRAK

Konflik merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konflik yang terjadi sangat beragam, mulai dari konflik yang bersifat pribadi, konflik yang bersifat politik, konflik yang bersifat sosial, hingga pada konflik yang bersifat internasional. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pun juga beragam yakni konflik dengan kekerasan dan konflik dengan tanpa kekerasan. Dalam penyelesaiannya, tentu saja dibutuhkan resolusi konflik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik dan intervensi seperti apa yang cocok dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode studi kasus yang mengambil kasus *Understanding Violence in SEAsia*, konflik perusahaan-masyarakat di sektor industri perkebunan, dan konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan pedesaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya resolusi konflik yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Namun, penyelesaian yang dilakukan tentunya beragam sesuai dengan tingkat kesukaran konfliknya. Negosiasi dan mediasi merupakan tahap penyelesaian kasus yang selalu digunakan pada tahap awal penyelesaian masalah.

**Kata kunci:** *Konflik, Resolusi Konflik, Mediasi, Negosiasi*

### ABSTRACT

*Conflict is a common and unavoidable thing in the life of society and the state. Conflicts that occur are very diverse, ranging from personal conflicts, political conflicts, and social conflicts, to international conflicts. The forms of violence that occur also vary, namely violent conflict and non-violent conflict. In its resolution, of course, conflict resolution is needed. This article aims to find out how conflicts occur and what kind of intervention is suitable for solving the problem. The writing of this article uses a literature study with a case study method that takes the case of Understanding Violence in SEAsia, company-community conflict in the plantation industry sector, and conflict and social change in fishing and rural communities in Indonesia. The result of this research is that there is conflict resolution carried out in resolving these conflicts. However, the resolution varies according to the level of difficulty of the conflict. Negotiation and mediation are stages of case resolution that are always used in the early stages of problem-solving.*

**Keyword:** *Conflict, Conflict Resolution, Mediation, Negotiation*

### PENDAHULUAN

Konflik meenjadi suatu fenomena yang lumrah dan tidak bisa dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua konflik sosial dimulai dari pengalaman situasi sosial yang berbeda. Beberapa pengalaman atau situasi yang tidak mengenakan akan menyatu menjadi sebuah perselisihan. Menurut Coser (1967) konflik sosial adalah perebutan nilai-nilai atau klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan, tetapi juga untuk menetralsisir, melukai, atau melenyapkan lawan. Pada dasarnya bahwa semua konflik berkaitan

dengan sesuatu yang dianggap salah, tidak pantas, atau tidak diinginkan.

Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya konflik sangat beragam, yaitu seperti perbedaan individu, kepentingan, kebudayaan, keyakinan, hingga pada perubahan sosial. Tidak hanya itu, adanya pihak-pihak yang berupaya memprovokasi kedua belah pihak pun bisa menjadi penyebab terjadinya konflik. Konflik yang terjadi sangat beragam, mulai dari konflik yang bersifat pribadi, konflik yang bersifat politik, konflik yang bersifat sosial, hingga pada konflik yang bersifat internasional. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pun juga beragam yakni konflik dengan

kekerasan dan konflik dengan tanpa kekerasan.

Dalam penyelesaiannya, tentu saja dibutuhkan resolusi konflik. Resolusi konflik adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah antara lebih dari satu pihak yang berkonflik, yang dilakukan secara komperatif. Dalam prosesnya, resolusi konflik bertujuan untuk memahami konflik dan intervensi seperti apa yang cocok dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Resolusi konflik berkaitan dengan semua domain konflik, baik di dalam atau di antara keluarga, lingkungan, organisasi, komunitas, atau negara (Wagner-Pacifici & Hall, 2012). Karena manusia selalu mengobarkan konflik, manusia pun akan selalu melakukan berbagai cara untuk mengakhirinya.

Tulisan ini menganalisis konflik yang ada di Asia Tenggara dengan mengambil 3 kasus yaitu Understanding Violence in SEAsia, konflik perusahaan-masyarakat di sektor industri perkebunan, dan konflik dan perubahan sosial pada komunitas nelayan dan pedesaan di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik dan intervensi seperti apa yang cocok dilakukan dalam menyelesaikan masalah.

## METODE PENELITIAN

Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui mengumpulkan berbagai data dari pustaka. Berbagai sumber data tersebut kemudian digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menganalisis dan menjelaskan konflik yang terjadi. Metode kepustakaan ditulis melalui penjelasan deskriptif melalui data yang diperoleh dari berbagai pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik dan intervensi seperti apa yang cocok dilakukan dalam menyelesaikan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah antara lebih dari satu pihak yang berkonflik, yang dilakukan secara komperatif. Dalam prosesnya, resolusi konflik bertujuan untuk memahami konflik dan intervensi seperti apa yang cocok dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Resolusi konflik berkaitan dengan semua domain konflik, baik di dalam atau di antara keluarga, lingkungan, organisasi, komunitas, atau negara (Wagner-Pacifici & Hall, 2012). Karena manusia selalu mengobarkan konflik, manusia pun akan selalu melakukan berbagai cara untuk mengakhirinya. Seringkali salah satu pihak secara paksa memaksakan kehendaknya kepada pihak lain untuk mengakhiri konflik. Terkadang menggunakan kekerasan, tetapi ada juga yang menyelesaikan konflik dengan melakukan mediasi atau ajudikasi.

### Jenis-Jenis Konflik

#### 1. Konflik Perusahaan-Masyarakat di Sektor Perkebunan Industri Indonesia

| Perusahaan                                                                                                                                                  | Masyarakat                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Satuan Pengamanan<br>- Polisi<br>- Militer<br>- Satuan Pengamanan (Satpam)                                                                                  | - Komnas HAM<br>- Media Massa<br>- Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Pelaku tambahan:<br>- Masyarakat transmigran<br>- Pemerintah (Bupati & DPRD)<br>- Pialang lahan                                                             |                                                               |
| <b>Mediator</b>                                                                                                                                             |                                                               |
| - Pemerintah (Bupati & DPRD)<br>- Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)<br>- International Finance Corporation (IFC) Compliance Advisor Ombudsman (CAO) |                                                               |
| <b>Negosiator</b>                                                                                                                                           |                                                               |
| - Pengadilan (Hakim)<br>- Partai-partai politik                                                                                                             |                                                               |

Konflik ini dirangkum berdasarkan berbagai kasus-kasus pilihan yang ada di lapangan. Terdapat Sembilan kasus yang dibahas secara rinci. Pada kasus ini, peneliti

(dalam Policy Brief) menganalisis konflik menggunakan kerangka kerja eskalasi konflik oleh Friederich Glasl (1999) untuk menganalisa dinamika konflik dan eskalasi dengan strategi intervensi dan resolusi konflik yang berbeda (Bercovitch et al., 2009).

### **Dinamika konflik Perusahaan-Masyarakat**

Sebagian besar konflik yang dialami adalah konflik yang terjadi di Sumatera (39%), Kalimantan (35%), dan di Jawa (30%) karena memiliki populasi lebih padat dan perkebunan pohon industri berskala besar (Orth, Mei Persch & Mwangi, 2016). Penyebab konflik antara perusahaan dan masyarakat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tenurial lahan hingga pada ketidakadilan dalam pembagian manfaat kepada masyarakat. Jika dirangkum, penyebab konflik tersebut adalah akses terbatas sekitar 8%-10%, perusakan situs keramat sekitar 10%-11%, janji yang tidak ditepati sekitar 11%-13%, pembagian manfaat sekitar 16%, polusi sekitar 18%-23%, pengabaian hukum adat sekitar 26%, perampasan lahan sekitar 84%

Dari banyaknya penyebab konflik, posisi dari perampasan lahan menduduki persentasi tertinggi di antara semua penyebab konflik. Jika dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, sudah sangat jelas bahwa akar dari persoalan perampasan lahan adalah system kepemilikan tanah yang kacau sehingga sulit terdeteksi siapa pemilik sah dari tanah tersebut. Akibat dari keterbatasan pengakuan formal atas hak tanah perorangan ini, masyarakat dirugikan karena adanya oknum pejabat negara memberikan konsesi kepada perusahaan. Hanya bermodalkan uang dan koneksi, perusahaan sudah bisa mendapatkan tanah secara sah di mata hukum.

Sederhananya bahwa perampasan lahan merupakan akuisisi lahan berskala besar yang kontroversial. Akan tetapi, hanya karena perampasan lahan mencapai angka 87%, bukan berarti penyebab konflik yang

lainnya diabaikan. Semua penyebab harus tetap diperhatikan dan dicari solusinya.

### **Aktor yang terlibat**

Dalam menganalisis aktor, aktor yang terlibat dibagi atas dua bagian, yakin aktor yang berada di pihak perusahaan dan aktor yang ada di pihak masyarakat. Alasan dimasukkannya pihak pemerintah sebagai bagian dari perusahaan karena perebutan lahan yang terjadi disebabkan karena pemerintah memberikan konsesi lahan kepada perusahaan. Pemerintah juga menjadi bagian dari mediator. Namun jika dilihat dari kasus ini, semestinya pemerintah tidak menjadi mediator karena pemerintah merupakan aktor dari sebagian besar konflik yang ada. Begitu pula dengan satuan pengaman (Polisi, Brimob, dan Satpam) yang seharusnya bersifat netral namun cenderung berpihak kepada perusahaan. Pada kasus ini, tidak ditemukannya pihak yang menjadi arbitrator.

### **Tahapan eskalasi konflik menurut Friederich Glasl (1999)**

Glasl membagi tahapan eskalasi konflik menjadi 9 bagian, yaitu: 1) *hardening*; 2) *debates and polemics*; 3) *actions instead of words!*; 4) *images and coalitions*; 5) *loss of face*; 6) *strategies and threats*; 7) *limited destructive blows*; 8) *fragmentation of the enemy*; 9) *together into the abyss* (Glasl's Nine-Stage Model Of Conflict Escalation - Mediate.Com, n.d.). Selanjutnya, konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat akan dianalisis melalui 9 tahapan ini.

#### *1. Hardening*

Penyebab utama terjadinya konflik adalah perampasan lahan (84%). Selain itu, tidak memadainya kompensasi, pembagian manfaat, dan kegagalan dalam merealisasikan janji-janji merupakan penyebab yang seringkali muncul secara bersamaan.

#### *2. Debates and polemics*

Mediasi sering disalahtafsirkan dan diimplementasikan secara buruk.

Seharusnya, di tahap awal konflik, harus lebih banyak usaha yang dilakukan untuk mendorong komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat sehingga konflik yang terjadi bisa reda tanpa harus adanya tindakan kekerasan.

3. *Actions instead of words!*

Bentuk protes yang dilakukan dalam 71% kasus yang terjadi, satu atau beberapa pihak berusaha untuk mempublikasikan persoalan ini ke media, siaran pers, atau mengirimkan keluhan ke pihak ketiga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan bentuk protes untuk melawan konflik.

4. *Images and coalitions*

Dalam proses penyelesaian konflik, Lembaga Swadaya Masyarakat mendukung masyarakat setempat untuk menantang legalitas izin konsesi dan tidak berfokus pada hak-hak lahan masyarakat. Selain itu, dalam 19% kasus, *Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)* turut terlibat dan resolusi konflik melalui prosedur keluhan dan fasilitas penyelesaian sangketa.

5. *Loss of face*

Kehadiran pemerintah yang harusnya sebagai mediator ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah mendukung terciptanya mediasi dan negosiasi pihak yang berkonflik, akan tetapi di sisi lain pemerintah mengeluarkan surat izin penggunaan lahan kepada perusahaan.

6. *Strategies and threats*

63% kasus yang terjadi, perusahaan telah melakukan intimidasi dan ancaman kepada masyarakat. Contoh kriminalisasi yang dilakukan adalah penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap masyarakat yang mengambil tandan buah segar di lahan yang disengketakan.

7. *Limited destructive blows*

Berbagai jenis pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik cenderung berbeda-beda. Sementara, masyarakat berusaha untuk mempublikasikan konflik melalui publikasi media untuk meningkatkan visibilitas konflik. Namun sayangnya, perusahaan berusaha memadamkan bentuk protes tersebut secara paksa menggunakan teknik-teknik represif bukan melalui dialog atau resolusi.

8. *Fragmentation of the enemy*

Pada tahap ini, perusahaan melakukan kriminalisasi kepada anggota masyarakat. Dalam tindakan ini, perusahaan melibatkan pihak kepolisian dengan cara melakukan penangkapan kepada masyarakat yang memetik tandan buah segar. Hal ini menyebabkan para petugas keamanan perusahaan diserang dan dilukai oleh ratusan masyarakat.

9. *Together into the abyss*

Keberadaan militer dan pihak kepolisian yang seharusnya untuk menjaga perdamaian justru dianggap sebagai sebuah intimidasi oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, peluang digunakannya kekerasan sebanyak sembilan kali lipat. Beberapa riset menemukan bahwa keterlibatan satuan pengaman ini bersifat merusak dan tidak produktif. Persentasi kekerasan terhadap orang sebanyak 29%.

**Ragam intervensi konflik**

Dalam prosesnya, bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik menurut Johan Galtung dibagi menjadi tiga bagian yaitu *peace making*, *peace keeping*, dan *peace building* (Webel, Charles; Galtung, 2007). Berikut penjabaran dari tiga bentuk intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat.

- *Peace making*

Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat. Dalam 47% kasus, mediasi merupakan mekanisme yang dilakukan dalam resolusi konflik. Mediasi dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati atau DPRD. 31% kasusnya menggunakan negosiasi melalui pengadilan.

- *Peace keeping*

Pada proses ini, adanya usaha-usaha deeskalasi dari pihak yang berkonflik. Bentuk inisiatif yang digunakan dalam deeskalasi konflik seperti intervensi dari pemerintah, dialog bersama, komitmen tentang penyelesaian konflik secara damai, pemetaan lahan sengketa oleh pihak ketiga yang bersifat netral, dan penghentian operasional sementara pada lahan yang sesang disangketa.

- *Peace building*

Pada proses ini, misalnya dalam kasus PT Agrowiratama, keanggotaan RSPO diberikan syarat agar perusahaan secara terbuka mengumumkan rencana apapun yang berkaitan dengan operasional sehingga memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan negosiasi sebelum operasional berjalan.

## 2. Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Pedesaan di Indonesia

Konflik dan perubahan sosial menjadi dua fenomena sosial yang tidak bisa dipisahkan lagi. Oleh karenanya, konflik yang terjadi karena adanya perubahan sosial bisa terjadi pada siapa saja termasuk pada komunitas nelayan dan pedesaan di Indonesia (Kinseng, 2022). Seperti pada umumnya bahwa konflik yang terjadi bisa berupa bentuk konflik kekerasan dan destruktif yang menelan korban baik harta maupun nyawa. Konflik yang terjadi ini bukan hanya terbatas pada persoalan kelas seperti yang dikatakan oleh Karl Marx tetapi konfliknya justru beragam. Selain konflik kelas, jenis konflik nelayan dan pedesaan antara lain yaitu konflik alat

tangkap, konflik komunal, konflik status kependudukan, dll.

### Penyebab Konflik

Jika kita melihat dari sudut Karl Marx, pemicu konflik kelas tidak jauh dari penindasan dan eksploitasi. Namun, konflik di komunitas nelayan disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- Kebijakan

Konflik yang dipicu oleh kebijakan dibagi atas dua yaitu kebijakan yang berikatan dengan penggunaan alat tangkap dan kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan tarif yang dikenakan kepada nelayan.

- Wilayah tangkap (*fishing ground*)

Gangguan wilayah tangkap ini disebabkan oleh beberapa pihak seperti antar sesama nelayan, perusahaan, maupun pemerintah. Kelompok nelayan kecil akan merasa terganggu ketika nelayan besar beroperasi di wilayah tangkap mereka. Perusahaan juga dapat mengganggu wilayah tangkap nelayan ketidada adanya kegiatan seperti tambang, pelayaran, reklamasi, dll. Hal yang sama juga termasuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pembangunan pelabuhan atau konservasi perairan laut.

- Hal-hal yang mendalam seperti *livelihood*, *justice*, dan *dignity*.

Untuk konflik pada komunitas desa, *livelihood* menjadi isu yang paling mendominasi. Selanjutnya konflik terjadi karena tidak adanya *justice* atau keadilan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan keadilan ekonomi. Yang terakhir tentang isu *dignity* atau martabat. Isu ini tidak ada kaitannya dgn *livelihood* maupun keadilan sosial, tetapi masalah harga diri.

Melihat pemicu konflik ini, maka penanganan konflik yang berkaitan dengan beberapa hal di atas mutlak untuk diperlukan. Resolusi konflik yang diharapkan tentu saja bersifat adil dan beradab tanpa adanya kekerasan.

### Relasi Sosial dan Pola Konflik Kelas

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori konflik Karl Marx, Marx membagi kelas sosial berdasarkan hubungan antara alat produksi yakni pemilik alat produksi dan yang tidak memiliki alat produksi. Pada konflik kelas nelayan, yang dilihat adalah relasi terhadap tipe alat produksinya. Maka dari itu, muncullah pembagian kelas sosial nelayan kecil, nelayan besar, dan nelayan menengah. Konflik kelas yang terjadi pada nelayan bukan lagi perihal pemilik alat produksi dan buruh tetapi antara ketiga jenis nelayan tadi.

Jika di dalam teorinya Karl Marx mengatakan bahwa pemicu konflik kelas adalah eksploitasi dan penindasan, berbeda dengan pemicu konflik yang terjadi di kelas nelayan. Pemicu konfliknya adalah dominasi dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut. Keunggulan dan kecanggihan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan besar menjadikan mereka lebih unggul dalam mendapatkan hasil penangkapan ikan. Para nelayan kecil akan kalah dari segi hasil penangkapan yang dapat berpengaruh kepada *livelihood*-nya.

### Aktor Yang Terlibat

Konflik komunitas nelayan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal ini terjadi antara sesama nelayan dan konflik eksternal terjadi antara nelayan dengan pihak luar seperti perusahaan dan pemerintah.

| Aktor Konflik          | Jaringan Hubungan antar Aktor |
|------------------------|-------------------------------|
| Nelayan kelas besar    | Power (+)                     |
| Nelayan kelas menengah | Interest (-)                  |
| Nelayan kelas kecil    | Interest (-)                  |
| Perusahaan             | Power (+)                     |
| Pemerintah (DPRD)      | Power (+)<br>Interest (+)     |
| Buruh / ABK            | Power (-)                     |
| Pemilik kapal          | Power (+)                     |

### Ragam Intervensi Konflik

Dalam prosesnya, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan konflik yang tanpa kekerasan maupun ada kekerasan yaitu menghindari konflik, negosiasi dan mediasi. Namun jika pihak yang berkonflik tidak menemukan suatu kesepakatan yang adil, maka konflik tersebut dilakukan dengan arbitrase maupun adjudikasi. Hal ini sejalan dengan Burton (1995) yang membandingkan penyelesaian konflik antara: 1) solusi tersirat yang dinegosiasikan atau diabitrasi; dan 2) resolusi yang fokus pada pemuasan kebutuhan dasar manusia dari semua pihak yang terlibat (Wagner-Pacifici & Hall, 2012).

Dari konflik perubahan sosial pada komunitas nelayan di pedesaan, perubahan sosial terkadang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Hubungan antara keduanya bersifat dialektikal.

### 3. Memahami Kekerasan di Asia Tenggara

Makalah ini berbicara tentang memahami kekerasan di Asia Tenggara yang berfokus pada insiden kekerasan di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Masing-masing dari ketiga negara ini pernah mengalami konflik subnasional. Bentuk-bentuk tindakan subnasional seperti kerusuhan antar masyarakat, konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam, kekerasan pemilu, kejahatan perkotaan, dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan manusia dan menghambat pembangunan.

### Dinamika dan Bentuk Konflik

Secara umum, konflik yang terjadi di Indonesia, Filipina dan Thailand tidak jauh beda. Konflik kekerasan atau kelompok separatis terjadi di ketiga negara ini. Di Indonesia, terjadi konflik pertahanan, konflik sumber daya alam, intoleransi beragama, separatism, dan ancaman terorisme. Di Thailand, terdapat konflik kekerasan atau separatism seperti

kelompok Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), konflik klan atau rido, dan pembunuhan lawan politik. Sedangkan di Thailand terjadinya konflik pemberontakan minoritas Melayu-Muslim vs pemerintah di daerah ujung selatan (Bouvier & Smith, 2016).

Selain perjuangan separatis, bentuk konflik dan kekerasan lainnya juga terjadi di Asia Tenggara. Kekerasan yang terjadi bukan hanya antara pihak yang berkonflik dengan aparat saja, tetapi menjalar kepada kekerasan terhadap warga sipil. Untuk konflik gender, berdasarkan data yang ada, golongan yang rentan mengalami kekerasan adalah kekerasan adalah kaum perempuan. Hal ini bisa dilakukan oleh suaminya atau pasangan intimnya. Di Palaung, Myanmar, 90% perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

### **Pola Kekerasan**

Jika dilihat dari konflik yang ada di tiga negara ini, kekerasan yang terjadi bukanlah sesuatu yang bersifat spontan, namun bersifat konsekuensial dan strategis. Dalam melakukan hal ini, para pelaku kekerasan berfokus kepada konsekuensi, pendekatan, dan tujuan dari kekerasan tersebut tanpa melihat konsekuensi maupun siapa yang terdampak dari kekerasan yang mereka lakukan. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi berupa penembakan, pembunuhan, dan pengeboman. Kekerasan yang terjadi bahkan sampai menyebabkan kematian.

Hal menarik adalah adanya hubungan antara guncangan iklim dan konflik terhadap kekerasan manusia yang ditemukan di Indonesia. Sejumlah penelitian menemukan bahwa peningkatan suhu dan ketidakstabilan curah hujan meningkatkan risiko kekerasan di daerah, mulai dari kekerasan kriminal yang terjadi secara spontan hingga terjadinya perang saudara.

### **Ragam Intervensi Konflik**

Konflik subnasional mempunyai dampak dan intensitas yang bervariasi. Konflik ini juga melalui fase di mana

kekerasan dapat meningkat maupun menurun. Setiap wilayah konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan kontinum transisi peningkatan kekerasan menuju perdamaian yang terkonsolidasi.

Di negara-negara yang mengalami transisi politik, tidak ada proses kredibel yang dilakukan untuk memfasilitasi perdamaian dan mengakhiri kekerasan. Di wilayah transisi yang rapuh (proses transisi politik sedang berlangsung) seringkali diwujudkan dalam perundingan perdamaian awal, namun tingkat kepercayaan terhadap proses itu masih rendah. Untuk wilayah dengan transisi yang dipercepat, perundingan damai berlangsung dengan cepat dan cenderung menghasilkan kesepakatan. Banyak muncul ruang politik bagi para pelaku konflik dan membuat proses operdamai berhasil. Bahkan setelah kemenangan militer, wilayah-wilayah tersebut memasuki tahap konsolidasi.

### **KESIMPULAN**

Teori konflik tidak hanya berbicara sebatas konflik kelas yang dikembangkan oleh Marx, namun berkembang sampai kepada berbagai determinan sosial lainnya seperti ras, agama, etnis, budaya, gender, politik, dll. Jika dilihat dari konflik kekerasan yang terjadi di Asia Tenggara dengan mengambil contoh konflik di Indonesia, Thailand, dan Filipina, ketiga negara tersebut memiliki pendapatan yang rendah. Beberapa penelitian menemukan bahwa konflik lebih sering terjadi di negara-negara dengan pendapatan per kapita. Kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat menjadi penyebab terjadinya konflik.

Awal mula terjadinya konflik karena adanya perbedaan pandangan, sikap, dan perilaku. Kemudian muncullah kekerasan yang menurut Galtung terdapat tiga jenis yaitu kekerasan langsung, kultural, dan structural. Di dalam sebuah konflik tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan. Setelah kekerasan itu terjadi, maka terbentuklah transformasi konflik

yaitu *peace bulding*, *peace making*, dan *peace keeping*. Meskipun demikian, ada konflik-konflik yang sampai saat ini belum menemukan titik untuk berdamai meskipun sudah dilakukan dengan berbagai cara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bercovitch, J., Kremenyuk, V., & Zartman, I. W. 2009. The SAGE handbook of conflict resolution. *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 1–675.
- Bouvier, H., & Smith, G. 2016. Violence in Southeast Asia. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 357–545.
- Glasl's Nine-Stage Model Of Conflict Escalation - Mediate.com*. (n.d.). Melalui, <<https://mediate.com/glasls-nine-stage-model-of-conflict-escalation/>> [25/03/04]
- Kinseng, R. A. 2022. Konflik dan Perubahan Sosial dalam Komunitas Nelayan dan Pedesaan di Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar, Institut Pertanian Bogor, 26 Februari 2022.
- Orth, Mei Persch & Mwangi, E. 2016. *Konflik Perusahaan-Masyarakat Di Sektor Perkebunan Industri Indonesia*, 144.
- Wagner-Pacifici, R., & Hall, M. (2012). *Resolution of social conflict*. *Annual Review of Sociology*, 38: 181–199.
- Webel, Charles; Galtung, J. 2007. Handbook of Peace and Conflict Studie. In J. Webel, Charles; Galtung (Ed.). Hlm. 35-45. New York: Routledge.
- Wu, Xiaolin & Ye, Lin & Zhang, Xuelei. 2019. How community mobilization mediates conflict escalation? Evidence from three Chinese cities. *Journal of Urban Affairs*. 43: 1-14.